



LAPORAN

**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L KJIP)**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MINAHASA**

JANUARI, 2025

KATA PENGANTAR

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam mendukung jalannya pembangunan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa selaku bagian Integral Pemerintah Kabupaten Minahasa terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan segala sumber daya yang dimiliki untuk menjamin aksesibilitas masyarakat di Minahasa.

Tentu ada keberhasilan dan kekurangan ketika mencapai suatu tujuan namun dengan segala keterbatasan yang ada diharapkan lebih banyak keberhasilan yang dicapai serta diupayakan meminimalisir kekurangan-kekurangan yang terjadi. Untuk mengukur keberhasilan suatu pekerjaan perlu digambarkan lewat laporan hasil pencapaian kinerja organisasi gambaran yang terlihat pada laporan kinerja organisasi tentunya akan sangat bermanfaat untuk perbaikan dan perencanaan program- program kegiatan ke depan sehingga kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan transportasi yang memadai serta kemudahan untuk mendapatkan data informasi secara cepat dan akurat bisa terpenuhi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa disusun sebagai wujud semangat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi, pengambilan keputusan organisasi dalam mewujudkan tanggung jawab sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi.

Laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa pada tahun 2025 terdiri dari kegiatan :

1. Anggaran Belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.891.757.659,00,-
2. Anggaran belanja langsung sebesar Rp. 4.555.254.144,00,-

Pencapaian kinerja akan terus diupayakan pada tahun-tahun yang akan datang tentunya dengan mengalokasikan anggaran berdasarkan skala prioritas serta peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran dan peningkatan.

Sumber Daya Manusia Pengelola Teknis dan Administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa guna memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Akhirnya, kami haturkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa yang secara kontinyu/terus menerus memberikan nasehat serta arahan terhadap kinerja Aparat di jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberkati tugas kerja kita sekalian.

TONDANO, JANUARI 2026

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MINAHASA

RICKY H.R. LALOAN, SH.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690726 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 GAMBARAN UMUM	1
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI	1
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	2
1.4 GAMBARAN KEPEGAWAIAN.....	4
1.5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS.....	9
2.2 PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025	18
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 CAPAIAN KINERJA.....	21
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	33
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas yang mengemban tugas dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Pada dasarnya mempunyai tugas dan fungsi yaitu menginformasikan kepada masyarakat, namun harus didukung oleh sarana komunikasi.

Nomenklatur dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Perda Nomor 04 tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang kewenangan di sektor Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika terletak di Jalan Manguni No. 7 Kelurahan Wewelen Kecamatan Tondano Barat, dalam kegiatan pelaksanaan tugas sehari-hari adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa Pusat Pelayanan Informasi kepada masyarakat.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan berbasis teknologi informasi. Peran tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2025–2029 yang menekankan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penguatan pengelolaan data sektoral, serta pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah.

Melalui pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan mampu berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi pemerintahan, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis digital di Kabupaten Minahasa.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki fungsi strategis sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika.
2. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah.

3. Pengembangan dan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
4. Pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah.
5. Pengelolaan persandian untuk menjamin keamanan informasi pemerintah daerah.
6. Pengelolaan statistik sektoral untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data.
7. Diseminasi informasi pembangunan daerah kepada masyarakat.
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika.

Melalui pelaksanaan fungsi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi informasi pemerintah daerah, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pembangunan daerah.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

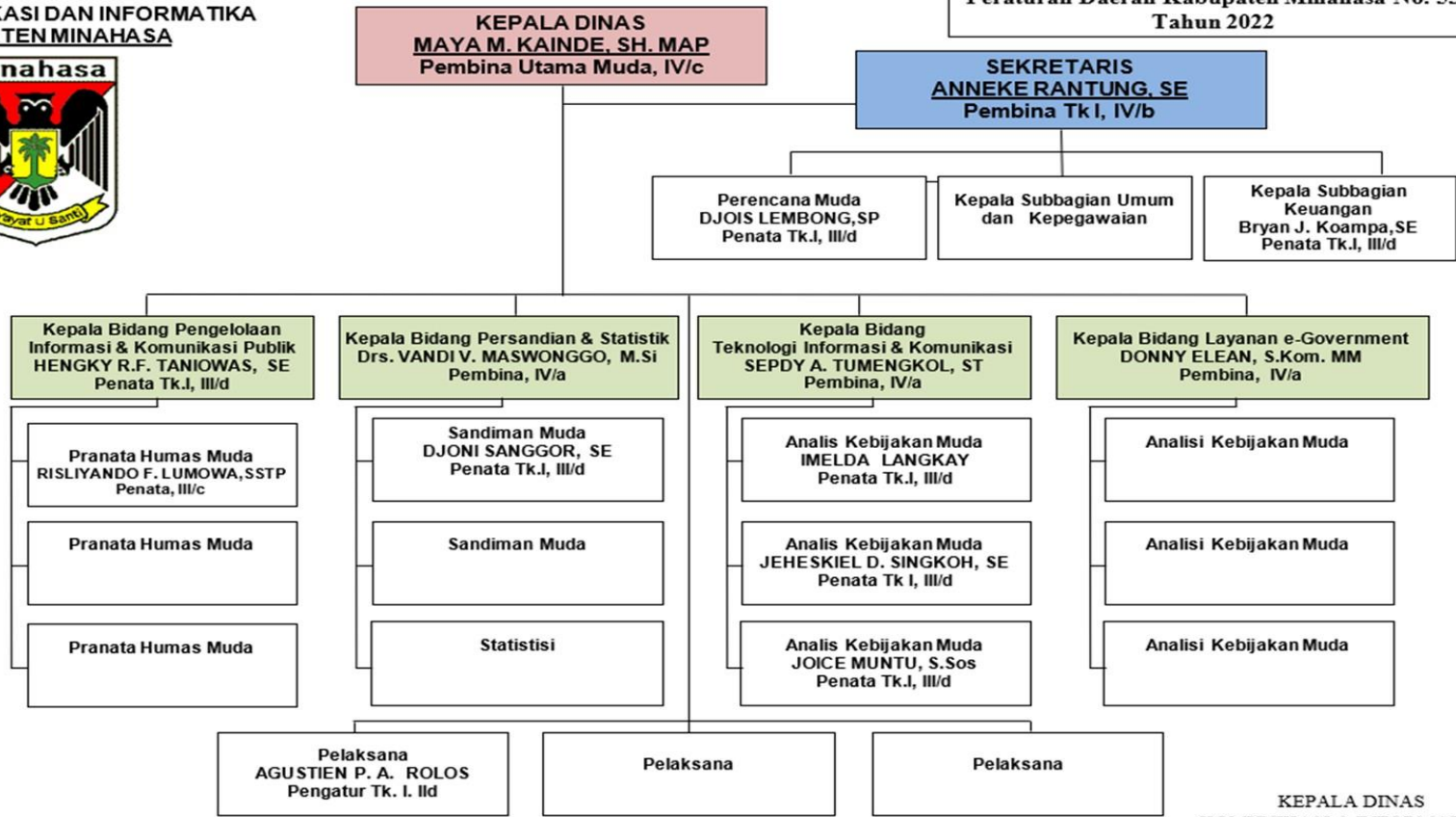
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa adalah :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas;
3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
4. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
5. Kepala Bidang Layanan e-Government;
6. Kepala Bidang Persandian dan Statistik;
7. 3 (tiga) Kepala Sub Bagian;
8. 9 (sembilan) Jabatan Fungsional Tertentu;

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MINAHASA**



Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No. 55
Tahun 2022



Kepala Dinas
KOMUNIKASI & INFORMATIKA,
(Signature)
MAYA M. KAINDE, SH. MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710904 199803 2 006

1.4 GAMBARAN KEPEGAWAIAN

NO	ESELON	JUMLAH
1.	III,A	1
2.	III,B	3
3.	IV,A	2
4.	FUNGSIONAL	7
5.	PPPK PARUH WAKTU	22
6.	OUTSOURCING	6
	JUMLAH	41

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1.	IV/B	1
2.	IV/A	2
3.	III/D	7
4.	III/C	1
5.	III/B	1
6.	II/D	1
	JUMLAH	13

1.5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI

Permasalahan terkait isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah. Beberapa permasalahan utama yang masih dihadapi antara lain belum optimalnya integrasi sistem informasi antar perangkat daerah, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi, serta keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Kondisi tersebut berdampak pada pencapaian indikator kinerja yang berkaitan dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta tingkat keterbukaan informasi pemerintah daerah.

Selain itu, pengelolaan data sektoral antar perangkat daerah juga masih memerlukan penguatan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan yang berbasis data. Oleh karena itu, penguatan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah menjadi salah satu fokus strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.

Dengan demikian, upaya penyelesaian terhadap permasalahan tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target indikator kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 1. 1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

PERMASALAHAN	PENYEBAB	RINCIAN PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)
Indeks Reformasi Birokrasi yang masih rendah	Sisten akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah masih perlu ditingkatkan agar lebih selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah. 2. Kualitas dokumen perencanaan kinerja dan indikator kinerja masih perlu diperkuat agar lebih berorientasi pada hasil (outcome). 3. Hasil evaluasi SAKIP belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja perangkat daerah.

Integritas pelayanan publik yang masih perlu diperkuat	Sistem pengawasan dan pengendalian internal belum optimal	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).2. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dalam pengelolaan kinerja dan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan belum optimal	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum terintegrasi secara menyeluruh	<ol style="list-style-type: none">1. Integrasi sistem informasi antar perangkat daerah masih terbatas.2. Pemanfaatan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik belum optimal dalam mendukung pelayanan publik.3. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di beberapa perangkat daerah masih perlu ditingkatkan.
Pengelolaan data sektoral daerah belum optimal	Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di daerah belum berjalan secara optimal	<ol style="list-style-type: none">1. Ketersediaan data sektoral yang terintegrasi antar perangkat daerah masih terbatas.2. Pemanfaatan data dalam proses perencanaan pembangunan daerah masih perlu ditingkatkan.

		3. Koordinasi pengelolaan data antar perangkat daerah masih perlu diperkuat.
--	--	--

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan Daerah sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan Identifikasi permasalahan-permasalahan dan telaahan yang telah dilakukan meliputi :

- Gambaran pelayanan
- Sasaran Dan Kebijakan RKPD periode 2025-2029
- Sasaran Jangka Menengah Kementerian/Lembaga.
- Sasaran Jangka Menengah SKPD Provinsi.
- Implikasi RTRW Kabupaten Minahasa.
- Implikasi KLHS Kabupaten Minahasa.

Maka isu strategis yang dapat disimpulkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Minahasa Smart City

Kabupaten Minahasa diharapkan untuk kedepannya memiliki manfaat dari keberadaan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Minahasa dalam bentuk peningkatan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

2. Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis Elektronik.

Mengimplementasikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan dan dapat diakses serta diikuti oleh lebih banyak lagi peserta pengadaan sehingga dapat menimbulkan persaingan yang sehat dan lebih transparan.

3. Pembangunan Kabupaten Minahasa Yang Berbasis Data.

Pembangunan daerah Kabupaten Minahasa yang di mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan haruslah di dasarkan atau dilandasi kepada Data dan informasi yang akurat dan terbaru guna memberikan dukungan kepada Pemerintah dalam melaksanakan fungsinya dalam penentuan arah dan sasaran pembangunan. Hal tersebut dapat terjadi manakala terfasilitasi dengan baik melalui pengintegrasian secara terpadu antara

pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dengan berbasis kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi.

4. Pelaksanaan dan Penerapan kaidah-kaidah e-Government.

Memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat adalah salah satu tujuan dari pelaksanaan segala urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa. Hal tersebut dapatlah terlaksana secara optimal apabila dilakukan dengan menggunakan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi masing-masing urusan, yang semula hanya dilaksanakan secara manual sehingga membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang besar pula dan hal ini tentunya jauh dari apa yang diinginkan oleh pelaksanaan E-Gov. yaitu salah satunya azas efisiensi dan efektifitas pengelolaan pemerintahan.

5. Keterbukaan dan Transparansi Informasi Bagi Masyarakat.

Seiring dengan semakin berubahnya pola pikir masyarakat yang semakin maju, kritis, dan berkembang membuat tuntutan terhadap keterbukaan dan transparansi akan data dan informasi semakin tinggi pula. Hal ini berimbas kepada semakin kritis dan berani masyarakat terhadap akses dalam menyampaikan pendapat dan akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya.

6. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat akan Teknologi Komunikasi dan Informasi Berbasis Kearifan Lokal.

Perkembangan teknologi pada bidang komunikasi dan informasi yang semakin berkembang dengan pesat dan cepat peril di respon dan dilakukan antisipasi terhadap dampak yang akan timbul baik itu dampak positif maupun negatif. Hal ini dapat terjadi apabila Pemerintah Kabupaten Minahasa bersikap responsive dan antisipatif melalui pelaksanaan dan pengembangan program-program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat pemanfaatan terhadap kebijakan-kebijakan atau kearifan lokal yang masih ada dan bertahan di tengah masyarakat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah. Agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Diskominfo Kabupaten Minahasa tahun 2025 ini merupakan tahun keempat laporan untuk program kegiatan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029.

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa meletakkan Visi dan Misi Tahun 2025-2029 :

a. Visi

Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan yang merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya tetapi juga pada kelanjutan organisasi itu sendiri. Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah tersebut.

Visi Merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana DISKOMINFO akan diarahkan dan apa yang akan menjadi sasaran yang akan dicapai serta hasil yang akan diperoleh.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Minahasa : Menuju Minahasa yang sejahtera dan Bermartabat, maka visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa adalah :

“ Terwujudnya Kabupaten Minahasa yang Inovatif, Fleksibel dan Terukur.”

b. Misi

Kemampuan organisasi untuk membuat uraian kegiatan secara akurat menggambarkan lingkup pekerjaan, pelayanan, memberikan kesempatan bagi organisasi untuk menyediakan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan semua stakeholders, sehingga kelangsungan serta perkembangan organisasi terjamin.

Misi adalah suatu pilihan organisasi untuk menyediakan produk bagi masyarakat, dan pemerintah.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa maka telah ditetapkan misi sebagai berikut:

- Mewujudkan Birokrasi layanan Komunikasi dan Informasi yang profesional, terintegritas dan bermoral.
- Mewujudkan kualitas sistem aplikasi yang terintegritas di semua lembaga pemerintah.
- Mewujudkan sistem layanan komunikasi serta pengawasan penyelenggaraan persandian.
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta mengembangkan kemitraan dalam penyebarluasan informasi publik.
- Mewujudkan profesionalisme telekomunikasi

c. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi dan tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Berdasarkan visi dan misi yang telah disebutkan diatas, maka tujuan pembangunan Diskominfo ditetapkan :

1. Meningkatkan layanan informasi, komunikasi dan penyelenggaraan pengawasan persandian serta mengembangkan kemitraan dibidang telekomunikasi.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang handal dalam mendukung tingkat pelayanan yang prima
3. Mewujudkan sistim pelayanan dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informatika dalam pengembangan pembangunan daerah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas termasuk meningkatkan semua pelayanan agar mencapai tingkat/ taraf nasional.
4. Meningkatkan pemberdayaan aparatur komunikasi dan informatika.

d. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Diskominfo Kabupaten Minahasa dalam jangka waktu Tahunan. Sasaran merupakan bagian

integral dalam sistem perencanaan strategis yang terfokus pada tindakan dan sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Sasaran bersifat spesifik dan terukur, sehingga dapat diukur dalam jangka waktu tertentu, baik Tahunan, semesteran, Triwulanan atau bulanan.

Sasaran-sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pembangunan dibidang, komunikasi dan informatika untuk menjamin pelayanan yang efisien berkualitas.
2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas di bidang, komunikasi dan informatika.
3. Terwujudnya Sistem Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang efisien, efektif dan produktif.
4. Meningkatkan profesionalitas aparatur komunikasi dan informatika.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting/Permasalahan yang Mendasari	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Minahasa			DAU			
2 16 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	2185590			1 Laporan	3185590
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2 16 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		21 Orang/bulan	2903071813			21 Orang/bulan	2993059000
2 16 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		1 Laporan	1215450			1 Laporan	2215450

					Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	49 Paket	44959990			49 Paket	54959990
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	44286331			1 Paket	54286331
2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	3600000			1 Dokumen	4600000
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	46656000			1 Laporan	60643242
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	18 Unit	260537535			18 Unit	270537535
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah							
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	6000000			2 Laporan	7000000

2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Laporan	34042950			1 Laporan	39142950
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Laporan	374410000			1 Laporan	394410000
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Jрусan Pemerintahan Daerah								
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Unit	38480000			1 Unit	39480000
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	132312000			1 Unit	152312000
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Terlaksananya Relasi Media		1 Laporan	3765000000			1 Laporan	4150841783
2	16	02	2.01	0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di	Terlaksananya Dukungan Administratif,		1 Laporan	18822270			1 Laporan	20822270

				Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik								
2	16	03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA									
2	16	03	2.02	Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		2 Laporan	12924225			2 Laporan	22924225
2	16	03	2.02	0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE		12 Dokumen	12924225			12 Dokumen	22924225
2	16	03	2.02	0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah		1 Dokumen	560183205			1 Dokumen	595205000
2	16	03	2.02	0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE		1 Dokumen	12924225			1 Dokumen	17924225
2	16	03	2.02	0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan	Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan		1 Dokumen	11614959			1 Dokumen	21614959

				anggaran SPBE Pemerintah Daerah	anggaran SPBE Pemerintah Daerah							
2	16	03	2.02	0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	107724225			1 Dokumen	107724225
2	16	03	2.02	0039	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	1 Program	15492270			1 Program	18932726
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							
2	20	02	2.01	0019	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Meningkatnya kualitas Statistik Sektoral	100 Persentase	18822270			100 Persentase	20751553
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							

2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Dokumen	18822270			1 Dokumen	20751553
JUMLAH												

2.2 PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025

Pada dasarnya Rencana Kerja mengurai target kinerja yang hendak dicapai. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada sasaran maupun tingkat kegiatan.

Pencapai tujuan dan misi telah menetapkan Perencanaan Kinerja Tahun 2025 mencakup tujuan, sasaran, dan sasaran strategis sebagai berikut :

Sasaran 1 : *“Terwujudnya pembangunan dibidang komunikasi dan informatika untuk menjamin pelayanan yang efisien berkualitas”*

Tabel 1

Tujuan	Sasaran	Sasaran Strategis
1. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika yang aman, ber kualitas.	1. Terwujudnya pembangunan di bidang komunikasi dan informatika untuk menjamin pelayanan yang efisien, berkualitas aman dan terjangkau.	1. Membaiknya pelayanan jasa komunikasi dan informatika 2. Terpeliharanya sarana dan prasarana yang baik 3. Kepuasan masyarakat dalam pelayanan prima 4. Membaiknya tingkat pelayanan umum.

Sasaran 2 : *“Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas di bidang komunikasi dan informatika”*

Tabel 2

Tujuan	Sasaran	Sasaran Strategis
1. Mewujudkan sumber da- ya manusia yang handal dalam mendukung tingkat pelayanan yang prima.	1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas di bidang komunikasi dan informatika	1. Meningkatkan profesionalisme SDM baik Secara teknis maupun non teknis

Sasaran 3 : *“Terwujudnya Sistim Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang efisien, efektif dan produktif”*

Tabel 3

Tujuan	Sasaran	Sasaran Strategis
1. Mewujudkan sistem pelayanan dalam bidang komunikasi dan informatika dalam pengembangan pembangunan daerah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas termasuk meningkatkan semua pelayanan agar mencapai tingkat/taraf nasional	1. Terwujudnya sistem pelayanan komunikasi dan informatika yang efisien, efektif dan produktif	1. Tersedianya prosedur / Sistem pelayanan jasa yang memadai

Sasaran 4 : *"Meningkatnya profesionalitas aparatur komunikasi dan informatika"*

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan pemberdayaan aparatur komunikasi dan informatika.	1. Meningkatnya profesionalitas aparatur, komunikasi dan informatika

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya pembangunan di bidang komunikasi dan informatika untuk menjamin pelayanan yang efisien, berkualitas aman dan terjangkau.	1. Terpenuhinya kebutuhan layanan administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah 2. Meningkatnya koordinasi dan sinergi pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika 3. Optimalnya pelayanan rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi sesuai ketentuan yang berlaku	100% 5 kegiatan 125 unit
2.	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas di bidang, komunikasi dan informatika	1. Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur 2. Tersedianya sarana operasional yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas aparatur 3. Meningkatnya penyebaran informasi pemerintah daerah melalui kerja sama dengan media massa	21 orang a. kendaraan dinas / operasional 1 unit b. Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional 1 tahun 1 kegiatan
3.	Terwujudnya sistem pelayanan komunikasi dan informatika yang efisien, efektif dan produktif.	1. Meningkatnya aksesibilitas arus informasi dan komunikasi masyarakat	100%
4.	Meningkatnya profesionalitas aparatur komunikasi dan informatika	1. Terwujudnya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah yang tepat waktu	1 dokumen

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informatika.

Dalam pelaksanaannya, program dan kegiatan yang telah direncanakan mengalami beberapa penyesuaian, baik dari sisi kegiatan maupun alokasi anggaran, yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa. Pengukuran tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja yang dicapai pada akhir tahun anggaran.

Secara umum, capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Hal ini terlihat dari pencapaian sebagian besar indikator kinerja yang telah mencapai target yang ditetapkan. Dari urusan yang dilaksanakan yaitu urusan komunikasi dan informatika, capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 mencapai 100%

Sasaran 1 : *“Terwujudnya pembangunan dibidang komunikasi dan informatika untuk menjamin pelayanan yang efisien berkualitas aman dan harga terjangkau”.*

Berdasarkan Rencana Kinerja tahun 2025, Capaian kinerja berdasarkan hasil kegiatan yang mendukungnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi	Capaian 2025

1.	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100%
2.	Terlaksananya Sosialisasi	kegiatan	3	5	5	100%
	serta koordinasi di bidang kominfo					
3.	Terlaksananya fasilitas dan Rekomendasi menara,	Unit	-	125	125	100%

Berdasarkan capaian indikator tersebut, sasaran ini secara umum telah tercapai dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

A. Analisis Faktor Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan sektor komunikasi dan informatika;
- koordinasi yang baik antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan perangkat daerah terkait;
- meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi yang cepat dan akurat.

B. Kendala yang Dihadapi

Meskipun target telah tercapai, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain:

- keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis di bidang teknologi informasi;
- kebutuhan peningkatan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung pelayanan komunikasi dan informatika;
- meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan informasi yang cepat dan transparan.

Sasaran 2 : “Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas di bidang komunikasi dan informatika”.

Sesuai rencana kinerja tahun 2025 melalui program Peningkatan Profesionalisme SDM baik secara teknis maupun non teknis.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian thn 2024	Target	Realisasi	Capaian thn 2025
1.	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur	orang	100%	21	21	100%
2.	Meningkatnya sarana operasional dan pengawasan	Tahun	100%	1	1	100%
3.	Kerja sama informasi dengan mass media	media	100%	1	1	100%

Berdasarkan tabel di atas, seluruh indikator kinerja pada sasaran ini telah mencapai target yang ditetapkan.

A. Analisis Faktor Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung oleh beberapa faktor antara lain:

- meningkatnya komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- tersedianya sarana operasional yang mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah;
- terjalinnya kerja sama yang baik dengan media massa dalam penyebarluasan informasi pemerintah daerah.

B. Kendala yang Dihadapi

Walaupun target kinerja tercapai, masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian ke depan, yaitu:

- masih terbatasnya jumlah aparatur yang memiliki kompetensi khusus di bidang teknologi informasi;
- perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.

Sasaran 3 : “Terwujudnya Sistem Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang efisien, efektif dan produktif”.

Berdasarkan rencana kinerja tahun 2025, sasaran akan dapat dicapai dengan tersedianya Sistem Pelayanan Jasa yang memadai. Capaian kinerja berdasarkan hasil kegiatan yang mendukungnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target	Realisasi	% Capaian 2025
Meningkatnya aksesibilitas informasi dan komunikasi pada masyarakat	persen	90%	100%	100%	100%

Berdasarkan capaian indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa **akses masyarakat terhadap informasi dan komunikasi publik telah meningkat dan mencapai target yang ditetapkan.**

A. Analisis Faktor Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- meningkatnya pemanfaatan media informasi dalam penyebaran informasi pemerintah daerah;
- dukungan teknologi informasi dalam pelayanan informasi kepada masyarakat;
- meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sumber informasi yang disediakan oleh pemerintah daerah.

B. Kendala yang Dihadapi

Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain:

- belum meratanya akses informasi di beberapa wilayah;
- perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana teknologi informasi.

Sasaran 4 : *"Meningkatnya profesionalitas aparatur komunikasi dan informatika."*

Berdasarkan rencana kinerja tahun 2025, sasaran akan dapat dicapai dengan tersedianya Sistem Pelayanan Jasa yang memadai. Capaian kinerja berdasarkan hasil kegiatan yang mendukungnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatkan Kualitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang Bersih, Akuntabilitas dan Profesional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan yang ditetapkan dan didistribusikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tercapainya Persentase Layanan Umum Kantor yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Peresentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase aset dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tersedianya Informasi dan Komunikasi Publik yang akurat dan memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Persentase Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. PROGRAM KEGIATAN DAN REALISASI ANGGARAN

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Periode 2025 sd 2026

Sub Tahap Rancangan Akhir

Kode Perangkat Daerah: 2.16.2.20.2.21.01.0000

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika

TUJUAN	SASARAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				
		Capaian	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan, serta meningkatnya keamanan informasi		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8.409.367.263		9.054.745.726		9.507.483.012		9.982.857.162		10.482.000.021		
	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Kualitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang Bersih, Akuntabilitas dan Profesional	Nilai SAKIP (Predikat)	A	3.891.757.659	A	3.891.757.659	A	4.075.832.088	A	4.279.623.693	AA	4.493.604.877	AA	4.718.285.121
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20	2185590	30	2185590	40	3185590	50	4.185.590	60	5.185.590	70	6.185.590
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	2185590	1 Laporan	2185590	1 Laporan	3185590	1 Laporan	4.185.590	1 Laporan	5.185.590	1 Laporan	6.185.590
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan yang ditetapkan dan didistribusikan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20	2.904.287.263	30	2.904.287.263	40	2.995.274.450	50	3.096.274.450	60	3.197.274.450	70	3.298.274.450

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		21 Orang/bulan	2893059000	21 Orang/bulan	2893059000	21 Orang/bulan	3893059000	21 Orang/bulan	3.093.059.000	21 Orang/bulan	3.193.059.000	21 Orang/bulan	3.293.059.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1215450	1 Laporan	1215450	1 Laporan	2215450	1 Laporan	3.215.450	1 Laporan	4.215.450	1 Laporan	5.215.450
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	20	44.959.990	30	44.959.990	40	54.959.990	50	64.959.990	60	74.959.990	70	84.959.990
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		49 Paket	44.959.990	49 Paket	44.959.990	49 Paket	54.959.990	49 Paket	64.959.990	49 Paket	74.959.990	49 Paket	84.959.990
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Persentase Layanan Umum Kantor yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20	94.542.331	30	94.542.331	40	119.529.573	50	140.529.573	60	161.529.573	70	182.529.573
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Paket	44286331	1 Paket	44286331	1 Paket	54286331	1 Paket	64.286.331	1 Paket	74.286.331	1 Paket	84.286.331
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Dokumen	3600000	1 Dokumen	3600000	1 Dokumen	4600000	1 Dokumen	5.600.000	1 Dokumen	6.600.000	1 Dokumen	7.600.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	46656000	1 Laporan	46656000	1 Laporan	56656000	1 Laporan	70.643.242	1 Laporan	80.643.242	1 Laporan	90.643.242
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peresentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	260.537.535	30	260.537.535	40	270.537.535	50	280.537.535	60	290.537.535	70	300.537.535
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		18 Unit	260537535	18 Unit	260537535	18 Unit	360537535	18 Unit	280.537.535	18 Unit	290.537.535	18 Unit	300.537.535

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20	414.452.950	30	414.452.950	40	440.552.950	50	466.652.950	60	492.752.950	70	518.952.950
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2 Laporan	6000000	2 Laporan	6000000	2 Laporan	7000000	2 Laporan	8.000.000	2 Laporan	9.000.000	2 Laporan	10.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Laporan	34042950	1 Laporan	34042950	1 Laporan	44042950	1 Laporan	44.242.950	1 Laporan	49.342.950	1 Laporan	54.542.950
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Laporan	374.410.000	1 Laporan	374.410.000	1 Laporan	394.410.000	1 Laporan	414.410.000	1 Laporan	434.410.000	1 Laporan	454.410.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	170.792.000	30	170.792.000	40	191.792.000	50	226.483.605	60	271.364.789	70	326.845.033
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Unit	38480000	1 Unit	38480000	1 Unit	39.480.000	1 Unit	40.480.000	1 Unit	41.480.000	1 Unit	42.480.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	132312000	1 Unit	132312000	1 Unit	152.312.000	1 Unit	186.003.605	1 Unit	229.884.78	1 Unit	284.365.033
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	80%	3.783.822.270	85%	3.783.822.270	90%	4.171.664.053	95%	4.380.247.255	100%	4.599.259.618	100%	4.829.222.599

		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi dan Komunikasi Publik yang akurat dan memadai	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi di dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	20	3.783.822.270	30	3.783.822.270	40	4.171.664.053	50	4.380.247.255	60	4.599.259.618	70	4.829.222.599
		Relasi Media	Terlaksananya Relasi Media		1 Laporan	3765000000	1 Laporan	3765000000	1 Laporan	4.150.841.783	1 Laporan	4.357.424.985	1 Laporan	4.574.437.348	1 Laporan	4.802.400.329
		Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		1 Laporan	18822270	1 Laporan	18822270	1 Laporan	20.822.270	1 Laporan	22.822.270	1 Laporan	24.822.270	1 Laporan	26.822.27
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	2,4	733.787.334	2,9	733.787.334	3,2	807.249.585	3,5	847.612.064	3,8	889.992.667	4,2	934.492.301
		Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	20	733.787.334	30	733.787.334	40	807.249.585	50	847.612.064	60	889.992.667	70	934.492.301
		Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		2 Laporan	12.924.225	2 Laporan	12.924.225	2 Laporan	22.924.225	2 Laporan	32.924.225	2 Laporan	42.924.225	2 Laporan	52.924.225

		Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE		2 Laporan	12.924.225	2 Laporan	12.924.225	2 Laporan	22.924.225	2 Laporan	32.924.225	2 Laporan	42.924.225	2 Laporan	52.924.225
		Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah		1 Dokumen	560.183.205	1 Dokumen	595.205.000	1 Dokumen	595.205.000	1 Dokumen	595.205.000	1 Dokumen	595.205.000	1 Dokumen	595.205.000
		Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE		1 Dokumen	12.924.225	1 Dokumen	12.924.225	1 Dokumen	22.924.225	1 Dokumen	32.924.225	1 Dokumen	42.924.225	1 Dokumen	52.924.225
		Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		1 Dokumen	11.614.959	1 Dokumen	11.614.959	1 Dokumen	21.614.959	1 Dokumen	31.614.959	1 Dokumen	41.614.959	1 Dokumen	51.614.959
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas		1 Dokumen	107.724.225	1 Dokumen	107.724.225	1 Dokumen	107.724.225	1 Dokumen	107.724.225	1 Dokumen	107.724.225	1 Dokumen	107.724.225
		Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi		1 Program	15.492.270	1 Program	15.492.270	1 Program	18.932.726	1 Program	19.295.205	1 Program	21.675.808	1 Program	26.175.442
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				18.822.270		18.822.270		20.751.553		21.789.130		22.878.587		24.022.516
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	50	18.822.270	60	18.822.270	70	20.751.553	80	21.789.130	90	22.878.587	100	24.022.516
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	20	18.822.270	30	18.822.270	40	20.751.553	50	21.789.130	60	22.878.587	70	24.022.516

		Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Meningkatnya kualitas data Statistik Sektoral			18.822.270		18.822.270		20.751.553		21.789.130		22.878.587		24.022.516
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				18.822.270		18.822.270		20.751.553		21.789.130		22.878.587		24.022.516
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	50	18.822.270	60	18.822.270	70	20.751.553	80	21.789.130	90	22.878.587	100	24.022.516
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	20	18.822.270	30	18.822.270	40	20.751.553	50	21.789.130	60	22.878.587	70	24.022.516
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			18.822.270		18.822.270		20.751.553		21.789.130		22.878.587		24.022.516

3.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam beberapa program dan kegiatan beserta kebutuhan pendanaan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun.

Program adalah bentuk dari suatu instrumen kebijakan yang berisi beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam RKPD Kabupaten Minahasa 2025-2029. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program yang berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. Setiap Program memiliki kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2025-2029 yang merupakan tindakan nyata yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan semaksimal mungkin.

Indikator kinerja secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan, keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsi akan melaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dalam Renstra. Adapun Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa tersaji dalam tabel di bawah ini :

Visi : Minahasa Daerah Pariwisata Yang Maju dan Sejahtera			
Misi : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel berbasis Digitalisasi dan Inovatif untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintahan	Indeks SPBE, Indeks Pencegahan Korupsi	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital, layanan statistik yang akurat dan dapat di andalkan, serta meningkatnya keamanan informasi
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	

Alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Minahasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 sebesar 7.567.657.583,00,- yang terdiri dari :

A. BELANJA OPERASI :

- a. Belanja Pegawai : 2.135.882.637,00
- b. Belanja Barang dan Jasa : 5.431.774.946,00

B. BELANJA MODAL

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin : 349.858.001,00

C. REALISASI (31 Desember 2025) : 7.917.515.584,00

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025
2	3	4
BELANJA DAERAH	8.792.589.273,07	6.236.888.148,00
BELANJA OPERASI	8.431.650.574,07	5.984.030.148,00
Belanja Pegawai	2.793.761.000,00	1.735.804.751,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.512.761.000,00	1.126.172.501,00
Belanja Gaji Pokok ASN	945.425.000,00	801.459.200,00
Belanja Gaji Pokok PNS	945.425.000,00	801.459.200,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	86.926.000,00	73.808.056,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	86.926.000,00	73.808.056,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	214.270.000,00	133.440.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	214.270.000,00	133.440.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.565.000,00	720.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.565.000,00	720.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	40.400.000,00	34.327.080,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	40.400.000,00	34.327.080,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	110.646.000,00	25.926.005,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	110.646.000,00	25.926.005,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.000,00	8.894,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.000,00	8.894,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	104.730.000,00	50.077.510,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	104.730.000,00	50.077.510,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.947.000,00	1.601.427,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.947.000,00	1.601.427,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.841.000,00	4.804.329,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.841.000,00	4.804.329,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.281.000.000,00	609.632.250,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.281.000.000,00	609.632.250,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.281.000.000,00	609.632.250,00
Belanja Barang dan Jasa	5.637.889.574,07	4.248.225.397,00
Belanja Barang	90.825.632,00	47.278.000,00
Belanja Barang Pakai Habis	90.825.632,00	47.278.000,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	503.940,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.156.170,00	1.848.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.205.000,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.000.000,00	5.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	11.344.200,00	3.300.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	621.600,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.498.722,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.832.000,00	37.130.000,00

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.664.000,00	0,00
Belanja Jasa	5.335.014.742,07	4.045.502.277,00
Belanja Jasa Kantor	5.314.096.792,07	4.041.234.327,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.400.000,00	4.700.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	624.000.000,00	459.760.000,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	159.600.000,00	30.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	98.141.792,07	24.976.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	36.000.000,00	26.730.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	4.269.000.000,00	3.480.000.000,00
Belanja Tagihan Air	3.000.000,00	2.500.000,00
Belanja Tagihan Listrik	4.335.000,00	1.477.555,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	2.400.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	106.020.000,00	8.690.772,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.367.950,00	4.267.950,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	15.367.950,00	4.267.950,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.550.000,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.550.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	150.945.200,00	135.430.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.480.000,00	24.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	38.480.000,00	24.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	112.465.200,00	111.430.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-	112.465.200,00	111.430.000,00

Bangunan Gedung Kantor		
Belanja Perjalanan Dinas	61.104.000,00	20.015.120,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.104.000,00	20.015.120,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	58.104.000,00	20.015.120,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	8.431.650.574,07	5.984.030.148,00
BELANJA MODAL	360.938.699,00	252.858.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	360.938.699,00	252.858.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.655.780,00	8.547.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	8.655.780,00	8.547.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	8.655.780,00	8.547.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00
Belanja Modal Komputer	352.282.919,00	244.311.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	352.282.919,00	244.311.000,00
Belanja Modal Peralatan Mainframe	251.166.915,00	244.311.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	101.116.004,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL	360.938.699,00	252.858.000,00
JUMLAH BELANJA	8.792.589.273,07	6.236.888.148,00
SURPLUS/DEFISIT	(8.792.589.273,07)	(6.236.888.148,00)

3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Capaian Kinerja

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan untuk menilai sejauh mana pemanfaatan sumber daya anggaran mampu mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat melalui perbandingan antara tingkat realisasi anggaran dengan capaian kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan.

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa melaksanakan beberapa program yang mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sebagian besar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat tercapai sesuai dengan target yang direncanakan dengan tingkat capaian sebesar 100 persen.

Sementara itu, realisasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang cukup baik dan tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah mampu mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah secara efektif dan efisien.

Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	95%	95%	100%	Efisien
Program Informasi dan Komunikasi Publik	100%	96%	96%	100%	Efisien
Program Aplikasi Informatika	100%	94%	94%	100%	Sangat Efisien

Analisis Efisiensi Anggaran per Sasaran

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
Pembangunan bidang komunikasi dan informatika	100%	Efisien
Pengembangan SDM bidang Kominfo	100%	Efisien
Pelayanan komunikasi dan informatika	100%	Sangat Efisien
Profesionalitas aparatur Kominfo	100%	Efisien

Analisis Tren Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Akses informasi masyarakat	85%	90%	100%
Koordinasi dan sosialisasi Kominfo	3 kegiatan	3 kegiatan	5 kegiatan
Rekomendasi menara telekomunikasi	110 unit	118 unit	125 unit

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan berada di bawah pagu anggaran yang telah ditetapkan, namun capaian kinerja tetap mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa telah dilaksanakan secara efisien dengan tetap menghasilkan kinerja yang optimal. Ke depan, peningkatan efisiensi penggunaan anggaran akan terus dilakukan melalui perencanaan program dan kegiatan yang lebih terarah serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik

3.4 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar, Target, dan Capaian Tingkat Provinsi/Nasional

Analisis perbandingan capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui posisi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa dibandingkan dengan standar atau capaian kinerja pada tingkat provinsi maupun nasional. Analisis ini menjadi bahan evaluasi untuk menilai sejauh mana kinerja perangkat daerah telah mendukung penguatan tata kelola pemerintahan digital, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan keamanan informasi.

Indikator yang digunakan sebagai pembanding dalam analisis ini meliputi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Pelayanan Publik (IPP), serta Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI). Ketiga indikator tersebut merupakan indikator nasional yang digunakan oleh pemerintah pusat dalam menilai kinerja pemerintahan daerah.

A. Perbandingan Indeks SPBE

Pada tahun 2024, Indeks SPBE Kabupaten Minahasa tercatat sebesar 2,30 dengan kategori Cukup. Nilai ini menunjukkan bahwa implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik telah berjalan namun masih memerlukan peningkatan terutama dalam integrasi sistem informasi, tata kelola teknologi informasi, serta pengembangan layanan digital.

Tahun	Wilayah	Nilai SPBE	Kategori
2024	Kabupaten Minahasa	2,30	Cukup
	Rata-rata Kabupaten/Kota Nasiona	3.93	Sangat Baik
	Rata-rata Nasional	3,12	Baik

Berdasarkan perbandingan tersebut, nilai SPBE Kabupaten Minahasa masih berada di bawah rata-rata nasional pemerintah kabupaten/kota sehingga diperlukan peningkatan integrasi aplikasi pemerintahan serta penguatan layanan digital.

B. Perbandingan Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023 oleh Kementerian PANRB, Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Minahasa memperoleh nilai 83,86 dengan kategori Baik.

Tahun	Wilayah	Nilai	Kategori
2023	Kabupaten Minahasa (2023)	83,86	Baik
	Sulawesi Utara	97.18	Kualitas Tinggi
	Rata-rata Nasional	3,78 (skala 1–5)	Baik

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Minahasa telah berada pada kategori baik, namun peningkatan kualitas pelayanan tetap perlu dilakukan melalui digitalisasi layanan serta peningkatan standar pelayanan publik.

C. Perbandingan Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)

Indeks KAMI merupakan instrumen evaluasi yang digunakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara untuk menilai tingkat kesiapan keamanan informasi pada instansi pemerintah.

Wilayah	Nilai	Status
Kabupaten Minahasa	-	Belum dilakukan pengukuran
Standar kategori baik	>500	Berdasarkan metode penilaian BSSN

Belum dilaksanakannya pengukuran Indeks KAMI menunjukkan bahwa evaluasi tingkat kematangan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah masih perlu dilakukan.

Analisis Posisi Kinerja

Berdasarkan perbandingan dengan indikator nasional, juga provinsi tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja sektor komunikasi dan informatika di Kabupaten Minahasa menunjukkan hasil yang cukup baik pada aspek pelayanan publik, namun masih memerlukan peningkatan pada aspek tata kelola pemerintahan digital dan keamanan informasi.

Oleh karena itu, peningkatan kinerja ke depan perlu difokuskan pada penguatan implementasi SPBE, peningkatan digitalisasi pelayanan publik, serta pelaksanaan evaluasi keamanan informasi melalui pengukuran Indeks KAMI.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tahun 2025, antara lain:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa telah mengacu pada Peraturan Bupati Minahasa Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa melaksanakan program dan kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya aparatur yang dimiliki serta tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
3. Ukuran keberhasilan atau kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban diperoleh dari laporan kinerja masing-masing unit organisasi dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
4. Dalam hal pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat terlihat bahwa secara umum sebagian besar target kinerja dapat tercapai dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Beberapa pokok permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja sasaran strategis antara lain disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi, keterbatasan dukungan anggaran, serta masih perlunya peningkatan integrasi sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi kinerja diketahui bahwa capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Minahasa masih berada pada kategori cukup serta pengukuran Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) belum dilaksanakan, sehingga perlu menjadi perhatian dalam peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun berikutnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa akan melakukan beberapa langkah perbaikan kinerja antara lain melalui peningkatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan memperkuat tata kelola teknologi informasi serta integrasi aplikasi pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media komunikasi pemerintah daerah, pelaksanaan evaluasi dan pengukuran Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) guna meningkatkan kesiapan keamanan sistem informasi pemerintah daerah, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi melalui pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparatur. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi juga akan terus dilakukan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dengan adanya langkah-langkah perbaikan tersebut diharapkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa pada tahun-tahun mendatang dapat terus meningkat serta mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan dan akuntabel mengenai pelaksanaan kinerja perangkat daerah serta menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

TONDANO, JANUARI 2026

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MINAHASA

RICKY H.R. LALOAN, SH.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690726 200312 1 004